

No. 183 Mei 2021

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

**KAJIAN RANTAI NILAI
AWALI PEMULIHAN
INDUSTRI SUTRA
SULAWESI SELATAN**

**MERAWAT ALAM SUMBA
LEWAT TENUN
PEWARNA ALAMI**

**CERITA DARI
PULAU TIGA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

Mei 2021

No. 183

- 1** Kajian Rantai Nilai Awali Pemulihan Industri Sutra Sulawesi Selatan
Oleh **KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE**
- 5** Strategi Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Papua dan Papua Barat
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 9** Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami
Oleh **DIANA TIMORIA**
- 13** Pajak dan Retribusi *Online* Dorong Pendapatan Daerah
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 17** Manajemen Kebersihan Menstruasi Bagi Siswa SD
Oleh **NURFITRIANA & A. ARIFAYANI**
- 21** Cerita Dari Pulau Tiga
Oleh **SYAIFULLAH**
- 25** Pembangunan Pertanian Menjadi Strategi Menurunkan Kemiskinan di Lombok Timur Masa Pandemi
Oleh **MAHARANI**
- 29** Setahun Pandemi: Ini 5 Riset COVID-19 Penting di Indonesia Agar Kita Tak Terperosok Berulang Kalian
Oleh **IRWANDY**
- 33** Tantangan Sektor Manufaktur: Kualitas Benang dan Upah Penenun Rendah
Oleh **RAHMAD SABANG**
- 38** Konsep Hubungan Bahasa dan Budaya dalam Masyarakat Demokratis
Oleh **SAMUELLA CHRISTY**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto Cover :
Adwit B. Pramono /Yayasan BaKTI



Foto: Ichsan Djunaed/Wayasan BaKTI

KAJIAN RANTAI NILAI AWALI PEMULIHAN INDUSTRI SUTRA SULAWESI SELATAN

Oleh **KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE**

Kajian rantai nilai komoditas sutra diharapkan bisa mendorong kebijakan berbasis bukti yang dapat mengembalikan kejayaan sutra di provinsi tersebut. Penerapan pendekatan dengan melibatkan pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kajian ini akan memperkaya perspektif yang akan sangat berguna bagi upaya mendorong kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, pemulihan industri sutra diharapkan bisa berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.



Sutra pernah menjadi produk unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum produksinya terus menurun. Kajian rantai nilai komoditas sutra diharapkan bisa mendorong kebijakan berbasis bukti yang dapat mengembalikan kejayaan sutra di provinsi tersebut.

Demikian bahasan dalam Seminar Hasil Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra: Mengembalikan Kejayaan Sutra Sulawesi Selatan yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (9/2). Acara ini diadakan oleh Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Seminar ini diadakan untuk memaparkan hasil kajian rantai nilai sutra di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Enrekang, Soppeng dan Wajo. Selain tim peneliti yang memaparkan hasil kajiannya, acara ini juga menghadirkan sejumlah penanggap.

Kajian rantai nilai yang dimulai pada Agustus 2020 merupakan bagian dari pilot program penyusunan kebijakan berbasis bukti yang dilaksanakan Bapelitbangda Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI dengan dukungan KSI. "Sutra menjadi komoditas strategis karena rantai nilai sutra itu panjang, melibatkan banyak aktor dan berpotensi memulihkan perekonomian daerah pascapandemi COVID-19," kata Direktur Yayasan BaKTI Muhammad Yusran Laitupa.

Kajian kolaboratif yang dilakukan Bapelitbangda Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI bersama pelaku pengetahuan lainnya dalam rangka menunjukkan cara penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan ini diapresiasi Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins. Menurutnya, penerapan pendekatan *triple helix* (melibatkan tiga aktor yakni pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat) dalam kajian ini akan memperkaya perspektif yang akan sangat berguna bagi upaya mendorong kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, pemulihan industri sutra diharapkan

Pada tahun 1970-an, Sulawesi Selatan bisa menghasilkan 140 ton benang sutra per tahun. Namun, mulai 1980-an produksi sutra terus menurun. Saat ini, produksi benang sutra Sulawesi Selatan hanya 2,5 ton per tahun.

bisa berperan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Ketua Tim peneliti Andi Sadapotto menjelaskan, kajian yang berlangsung selama lima bulan ini menggunakan kerangka multi-disiplin. Aspek rantai nilai, kebijakan, penghidupan, ekonomi dan lingkungan, gender dan inklusi sosial dimasukkan di dalam kerangka tersebut. Menurutnya, pengembangan sutra mulai ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an dan berkembang pesat di kawasan perdesaan. Pada tahun 1970-an, Sulawesi Selatan bisa menghasilkan 140 ton benang sutra per tahun. Namun, mulai 1980-an produksi sutra terus menurun. Saat ini, produksi benang sutra Sulawesi Selatan hanya 2,5 ton per tahun.

Tim peneliti menemukan penyebab menurunnya produksi sutra tersebut ada di sektor hulu, produksi dan manufaktur, serta hilir. Di sektor hulu, kendala yang ditemui antara lain menurunnya jumlah petani murbei dan pemelihara ulat sutra seiring dengan konversi lahan serta ketergantungan pada impor telur ulat sutra. Di sisi lain, kebijakan untuk memacu produksi tidak memiliki arah yang jelas dan penelitian terkait sektor hulu sutra berjalan sendiri-sendiri.

Di sektor produksi dan manufaktur, masalah yang muncul antara lain adalah rendahnya kualitas kokon, terbatasnya alat pemintal, kurangnya pasokan benang lokal, hingga pelaku usaha pemintalan yang gulung tikar. Penunjang mandiri sulit bertahan karena upah yang rendah. Untuk per lembar sarung sutra yang dikerjakan selama tiga hari, mereka menerima upah



Foto: Dok. Tim Peneliti

Kajian ini membuktikan bahwa secara umum, akumulasi nilai tambah produk kurang dinikmati oleh pelaku usaha di tingkat pertama seperti petani, perajin maupun nelayan. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian daerah yang inklusif, nilai tambah harus bisa dinikmati mulai dari tingkat petani, nelayan, perajin, hingga hingga pedagang

30 ribu rupiah. Tenaga kerja di sektor ini didominasi perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Adapun di sektor hilir, kajian ini menemukan bahwa potensi pasar sutra lokal sebenarnya menjanjikan karena siklus hidup masyarakat Bugis Makassar sangat erat dengan sutra. Mulai dari ritual bayi lahir hingga acara adat maupun sosial, masyarakat harus memakai kain sutra. Namun, konsumen tidak bisa membedakan sutra asli dan campuran sehingga lebih memilih kain campuran dengan harga yang terjangkau.

Anggota tim peneliti Lusia Palulungan menuturkan, untuk mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan, berbagai upaya perlu dilakukan di sektor hulu, manufaktur dan produksi serta hilir sesuai dengan temuan masalah yang ada. Di sektor hulu, misalnya, perlu ada perbaikan produksi telur ulat sutra, perbaikan sistem deteksi dini penyakit, perbaikan kelembagaan infrastruktur dan sumber daya manusia, pengorganisasian petani, peningkatan kapasitas tenaga pendamping petani agar sensitif gender dan sebagainya.

Di sektor manufaktur dan produksi, perlu ada pembentukan unit pengelola alat pemintal otomatis yang diberikan pemerintah. Selain itu, perlu ada pelatihan penenun, pembentukan kelompok penenun, pembukaan akses bantuan alat dan modal bagi penenun, pengawasan hak-hak penenun dan lain-lain. Sedangkan di sektor hilir, perlu ada peraturan bersama gubernur dan bupati terkait labelisasi produksi sutra, dukungan promosi dengan berbagai cara termasuk kebijakan mengenakan kain sutra pada hari tertentu, perbaikan sistem sertifikasi produk sutra dan sebagainya. Seluruh upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan lintas sektor.



Foto: Dok. Tim Peneliti

Sumedi Andono Mulyo dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang menjadi salah satu penanggap mengapresiasi hasil kajian ini. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui kajian ini dinilai sudah cukup rinci. Menurutnya, kajian ini membuktikan bahwa secara umum, akumulasi nilai tambah produk kurang dinikmati oleh pelaku usaha di tingkat pertama seperti petani, perajin maupun nelayan. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian daerah yang inklusif, nilai tambah harus bisa dinikmati mulai dari tingkat petani, nelayan, perajin, hingga pedagang. “Dari kajian ini kita jadi tahu di sisi mana nilai tambah itu dan apa yang harus dilakukan, misalnya terkait upaya pengentasan kemiskinan,” katanya.

Seminar ini menjadi sarana bagi Tim Kajian untuk mendapatkan masukan dan tanggapan pada hasil-hasil yang telah dipresentasikan, guna menyelesaikan laporan kajian. Perwakilan berbagai dinas pada provinsi dan kabupaten, peneliti dan pengamat sutra Sulawesi Selatan, dan perwakilan beberapa kementerian turut hadir dan memberikan tanggapan pada sesi diskusi. Poin-poin yang disampaikan merupakan masukan

berharga yang memperkuat laporan dan rekomendasi kebijakan dari kajian ini. Selanjutnya Bappelitbangda Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Yayasan BaKTI, akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari kajian ini, ke dalam suatu kebijakan pemerintah provinsi guna memajukan komoditas sutra Sulawesi Selatan.

KSI mendukung pilot program yang menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah didukung melalui suatu kajian terapan yang menjadi dasar suatu kebijakan. Pelaksanaan kajian rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pilot program tersebut. Dukungan ini diberikan KSI dalam rangka mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan hasil penelitian, data dan analisis yang lebih baik di tingkat lokal. Model dan pendekatan yang dilaksanakan akan didokumentasikan supaya dapat direplikasi oleh Pemda Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2300-kajian-rantai-nilai-awali-pemulihan-industri-sutra>

STRATEGI PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Bagi banyak orang, dokumen administrasi kependudukan, seperti akta lahir, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga, seringkali belum dianggap penting bahkan kerap diabaikan. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, setelah pemerintah gencar melakukan integrasi data untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan pelayanan publik dasar dan pemberian bantuan, barulah dokumen administrasi kependudukan terasa sangat penting.

Dokumen administrasi kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan memberi keabsahan identitas dan status warga dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami seseorang, seperti peristiwa kelahiran, pindah tempat tinggal, pernikahan, dan kematian.

Saat ini dokumen administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, telah menjadi syarat utama bagi warga untuk dapat memiliki jaminan kesehatan BPJS dan selanjutnya dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis. Begitu pula akta kelahiran yang dibutuhkan anak untuk dapat mendaftar sekolah dan kemudian mengakses berbagai bantuan pendidikan yang disediakan pemerintah.



Sayangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih terbilang kurang. Seringkali warga baru mengurus dokumen administrasi kependudukan setelah dibutuhkan, misalnya saat anak mesti mendaftar sekolah atau saat mesti mengakses layanan kesehatan gratis. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan.

Pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang selama ini memakan banyak waktu dan biaya serta prosedur yang berbelit-belit menjadi penyebab utama warga enggan melakukan pengurusan dokumen. Terlebih lagi di masa pandemi, semakin tidak mudah bagi warga yang bermukim di daerah pedalaman untuk melakukan perjalanan ke kota.



Menyiasati situasi ini, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia gencar menjalankan pencatatan akta kelahiran dan kartu tanda penduduk guna memastikan setiap warga negara memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Dukungan dari banyak pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan ini.

Jika selama ini pengurusan administrasi kependudukan dianggap sebagai tugas tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) semata, akan menjadi proses yang lebih baik jika tugas ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak lainnya. Tujuannya

Pemeriksaan kelengkapan dokumen kependudukan warga. Kebanyakan warga baru mengurus dokumen kependudukan mereka setelah dibutuhkan, misalnya saat anak mendaftar sekolah atau saat mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen adminduk.

Peningkatan Akses Layanan Dasar

Program KOMPAK-LANDASAN bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar berkualitas. Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, KOMPAK-LANDASAN mendukung program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak-Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI).



Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI

Dukungan mula-mula berupa penyusunan dan kesepakatan atas rancangan model-model peningkatan cakupan kepemilikan dokumen adminduk yang akan dilakukan. Proses ini sendiri telah dijalankan melalui Lokakarya Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PASH) dan Penyusunan Model-Model Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten pada Oktober 2019 lalu. Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari lima kabupaten sasaran program di Papua dan Papua Barat yaitu Jayapura, Asmat, Nabire, Manokwari Selatan dan Sorong. Kegiatan ini pun menghasilkan model yang akan dikembangkan di tiap kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing kabupaten target.

Model-model yang disepakati oleh masing-masing kabupaten ini selanjutnya diperkuat dengan penyusunan Peraturan Bupati mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di masing-masing kabupaten target. Peraturan bupati ini pun kini telah terbit di sejumlah

kabupaten yang menjadi wilayah program KOMPAK-LANDASAN yaitu di Kabupaten Manokwari Selatan, Jayapura, Asmat dan Nabire, sementara Kabupaten Sorong masih dalam proses penyusunan peraturan.

Adapun peraturan bupati ini memuat sejumlah hal penting dan teknis mengenai upaya percepatan kepemilikan dokumen adminduk, di antaranya jenis dokumen kependudukan yang merupakan bagian dari program ini yaitu kartu keluarga; kartu tanda penduduk; kartu identitas anak; akta kelahiran; akta perkawinan; akta kematian; akta pengakuan dan pengesahan anak; dan akta perceraian. Seluruh dokumen ini merupakan dokumen yang memuat peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang masing-masing memiliki fungsi yang berkaitan dengan sejumlah pelayanan publik.

Mengenai jalur percepatan pengurusan dokumen adminduk ini pun diatur dalam peraturan bupati tersebut yaitu melalui jalur distrik/kampung. Jalur distrik/kampung yang dimaksud adalah distrik memfasilitasi kampung-kampung dalam wilayahnya untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

Distrik akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Dukcapil dalam pengurusan dokumen kependudukan masyarakat dalam wilayah distrik tersebut.

Karena itu, salah satu hal yang juga akan didorong dalam program PASH ini adalah membuat perjanjian kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan distrik. Selanjutnya distrik akan mengarahkan kampung agar mengalokasikan dana kampung untuk program ini. Hal tersebut mengingat Kampung merupakan entitas yang bisa secara fleksibel dalam melakukan penganggaran untuk program percepatan adminduk dengan melalui musyawarah kampung.

Selain jalur distrik/kampung, jalur kesehatan pun ditempuh untuk memaksimalkan percepatan pengurusan dokumen adminduk. Melalui jalur kesehatan berarti Dinas Kesehatan memfasilitasi Rumah Sakit, Puskesmas ataupun layanan dasar kesehatan lainnya untuk membantu pengurusan dokumen berupa Akta Kelahiran maupun Akta Kematian. Terdapat pula jalur pendidikan di mana Dinas Pendidikan akan memfasilitasi satuan pendidikan dalam membantu pengurusan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Selesai dengan penyusunan peraturan bupati yang memuat model-model percepatan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen adminduk ini, di Kabupaten Jayapura pertamanya dilakukan diseminasi Peraturan Bupati mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yang telah disahkan pada Desember 2020 lalu. Desiminasi ini dilakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam program ini. Bersama dengan PUSKAPA-UI, pada Maret 2021 dilakukan agenda *Training of Trainer* fasilitator PASH dari Dinas Dukcapil dan Tim KOMPAK-LANDASAN. Kegiatan ini menghadirkan 10 distrik yang menjadi wilayah sasaran program di Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya program pelatihan kader kampung untuk PASH tengah disiapkan oleh kabupaten berkoordinasi dengan distrik. Sejumlah 38 kader akan dilatih mengenai tata

cara pengurusan dokumen adminduk. Tujuannya untuk mendampingi proses pengurusan dokumen adminduk bagi masyarakat di kampungnya. Kader-kader ini adalah warga kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk membantu pengurusan dokumen adminduk warganya. Kader kampung akan berperan dalam mendata status kepemilikan dokumen adminduk seluruh warga dan selanjutnya membantu menyiapkan berbagai prasyarat pengurusan berkas yang diperlukan.

Selain Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Manokwari Selatan pun telah selesai dengan pengesahan Peraturan Bupati mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan pada November 2020 lalu. Kini Kabupaten Manokwari Selatan pun tengah mengatur kerja sama antar OPD terkait baik di bidang kampung, kesehatan maupun pendidikan dan membentuk tim koordinasi yang akan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan percepatan peningkatan kepemilikan dokumen adminduk. Selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama lintas sektor yang terlibat seperti distrik/kampung, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar proses teknis percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dapat segera berjalan.

Strategi-strategi percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan ini akan menjadi hal yang baru bagi Papua dan Papua Barat. Dengan percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan, berarti mendekatkan pula masyarakat dengan akses layanan dasar mereka. Dengan demikian, mengingat program sinergi perencanaan pun telah dijalankan di delapan kabupaten dampingan sejak tahun 2019, maka terwujudnya peningkatan akses layanan dasar berkualitas akan dicapai dengan memastikan syarat perolehan layanan tersebut terpenuhi. Yaitu dengan memastikan semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

MERAWAT ALAM SUMBA LEWAT TENUN PEWARNA ALAMI

Oleh **DIANA TIMORIA**



Mariana Hoi Ata Ndau, membuat tenun khas Sumba, dengan cara tradisional dan memakai pewarna alami. Bikin tenun ikat merupakan

keterampilan turun temurun pada para perempuan Sumba.

Sebagian perempuan penenun di Sumba, telah beralih pakai pewarna kimia untuk proses mewarnai benang tenun. Harga tenun pewarna kimia lebih murah dan proses pewarnaan lebih cepat.

Para perajin tenun Sumba dengan pewarna alami seperti Mama Yo, nenek Barja Uru, meyakini, gunakan pewarna alami itu sebagai wujud kepedulian lingkungan hidup sekaligus cara merawat alam Sumba.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) juga melanda Sumba. Wisatawan sepi, kondisi ini berdampak juga penenun-penenun tradisional ini seperti Mama Yo. Pembeli tenun ikat berkurang.



Mariana Hoi Ata Ndau, baru selesai mewarnai benang untuk tenun ikat di rumahnya di Mauliru, Kecamatan Kambera, Sumba Timur. Tangan terlihat biru. Dia baru memproses tanaman nila-orang Sumba, biasa sebut wora-sebagai pewarna alami benang tenun.

“Warna biru ini tidak mudah hilang. Tangan saya akan terus berwarna biru selama beberapa hari,” kata Mama Yo, sapaan Mariana.

Mama Yo, membuat tenun dengan cara tradisional dan memakai pewarna alami. Bikin tenun ikat merupakan keterampilan turun temurun pada para perempuan Sumba. Keterampilan dan pengetahuan mereka dapatkan secara otodidak, mulai dari proses mudah sampai yang rumit.



Pembuatan tenun alami memakan waktu hingga tiga bulan bahkan lebih, tergantung kesibukan perajin tenun, termasuk kondisi cuaca.

Mama Yo telah menenun sejak remaja. Dari awal, dia bertekad pakai pewarna alami sebagai wujud kepedulian lingkungan hidup. Baginya, ini sebagai cara merawat alam.

Mama Yo mengatakan, tak mau kehilangan pengetahuan dan keterampilan cara meramu pewarna alami yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagian perempuan penenun di Sumba, telah beralih pakai pewarna kimia untuk proses mewarnai benang tenun. Harga tenun pewarna kimia lebih murah dan proses pewarnaan lebih cepat.

Lusi, penenun muda yang sedang menjemur benang yang diwarnai. Foto: **Diana Timoria**

Kalau penenun macam Mama Yo memerlukan waktu sampai tiga bulan saat mewarnai pakai wora, sedang pewarna kimia hanya perlu satu bulan. Perajin juga tinggal membeli pewarna di toko. Mereka tak perlu menanam tanaman di pekarangan atau kebun. Mereka pun dapat menghasilkan kain tenun lebih banyak dan jual setiap bulan, berbeda dengan penenun tradisional.

Tenun ikat Mama Yo, biasa dipakai untuk acara adat. Kemudian, Mama Yo pun coba berinovasi dengan menyesuaikan motif dalam



1

- 1 Mama Yo, penenun ikat pewarna alami Sumba
 - 2 Akar tanaman kombu atau morinda yang sudah dicincang
 - 3 Proses pewarnaan dengan akar tanaman kombu atau morinda
 - 4 Salah satu proses pembuatan warna biru menggunakan wora.
- Foto: **Diana Timoria**

memenuhi permintaan pasar. Tenun pun bisa dipakai tak hanya dalam acara adat, juga aksesoris seperti hiasan dinding dan sarung bantal.

Penenun lain, Nenek Banja Uru, juga pakai pewarna alami. Banja Uru, penganut Marapu, agama lokal masyarakat Sumba yang fokus menjaga keseimbangan alam. Bagi penganut Marapu, ketidakseimbangan alam akan mengakibatkan hal-hal buruk seperti bencana alam, penyakit dan lain-lain.

Termasuk pandemi COVID-19 ini, nenek Banja Uru menilai, sebagai contoh ketidakseimbangan pemanfaatan alam.

“Pakai pewarna alam itu sama dengan menjaga alam seperti pesan leluhur kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam. Sang pencipta dan sesama manusia. Kalau saya mau tetap pakai pewarna alam, saya harus jaga tanaman [nila] tetap ada.”

Banja Uru masih menanam tanaman ini di kebun sekitar rumahnya.

Upaya Nenek Banja Uru dan Mama Yo, dalam melestarikan tanaman pewarna dan tenun



3

dengan pewarna alami jadi teladan bagi generasi muda Sumba.

Adalah Melania Loda Ana Hammu, perempuan usia 21 tahun ini ikut bergerak melestarikan tanaman pewarna. Mahasiswa di Waingapu ini mulai menenun kain gunakan pewarna alami.

“Memakai kaus atau kemeja dengan celana jeans memang lebih praktis. Tetapi sebagai orang Sumba, saya lebih bangga memakai sarung tenun apalagi kalau saya yang membuat dengan bahan di sekitar saya.”

Martha Hebi, aktivis perempuan Sumba yang bergiat di Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan)-Sumba, mengatakan,



penggunaan pewarna alami oleh para penenun merupakan bentuk relasi kehidupan manusia dan alam yang harmoni. Para perajin tenun melihat, alam adalah sahabat yang memberikan kehidupan bagi mereka melalui tanaman pewarna alami.

“Pewarna alami berasal dari tanaman. Makin tinggi kebutuhan penggunaan pewarna alami, akan disertai upaya para penenun untuk menanamnya. Tanaman akan jadi lebih banyak.”

Dengan begitu, katanya, akan membantu suplai oksigen dan tutupan vegetasi. “Ini cara untuk menjaga keseimbangan alam,” kata Martha.

Terdampak Pandemi

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) juga sampai ke Sumba. Wisatawan sepi, kondisi ini berdampak juga penenun-penenun tradisional ini seperti Mama Yo. Pembeli tenun ikat berkurang.

Mama Yo, sempat pergi ke pasar untuk menjual kain, tetapi ditawar dengan harga sangat rendah. Biasa dia bisa menjual selendang 300 ribu-500 ribu rupiah. Sekarang, selendang tenun hanya ditawar 50 ribu rupiah.

“Saya bingung, saat saya butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi ini, harga selendang saya malah jadi sangat murah. Padahal, proses pembuatan selendang tenun ini sangat susah dan sama saja dengan saat sebelum dan selama pandemi,” katanya.

Ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan wisatawan domestik dan mancanegara ke Indonesia karena pandemi COVID-19, perajin tenun ikut terkena dampak.

Perputaran kain tenun menjadi lambat karena wisatawan minim dan acara adat tertunda. Alhasil, harga kain tenun menjadi sangat rendah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<https://www.mongabay.co.id/2020/12/10/merawat-alam-sumba-lewat-tenun-pewarna-alami>



PAJAK DAN RETRIBUSI *ONLINE* DORONG PENDAPATAN DAERAH

Oleh **SUMARNI ARIANTO**



ajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi serta pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem *online* yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan.



Kota Tual, Maluku Tenggara
Foto: **Tangkapan Layar Youtube**

Wilayah kabupaten Maluku Tenggara dengan ibu kota Langgur, tidak sebesar wilayah di Sulawesi atau Jawa. Maluku Tenggara adalah kabupaten yang relatif kecil dari segi luas wilayah. Potensi objek pajak juga terbatas misalnya restoran, rumah makan dan objek pajak lainnya. Sistem yang selama ini dipakai dalam menentukan objek pajak belum menggunakan sistem *online*. Sistem penetapan pajak dulunya menggunakan metode *self-assessment*.

Amanat aturan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, bahwa wajib pajak (WP) wajib menyetorkan pajaknya, namun kondisi di lapangan selama ini masih banyak WP yang tidak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai objek pajaknya. WP melaporkan sesuai apa yang mereka kehendaki bukan berdasarkan fakta transaksi di lapangan. Dengan metode *Self Assessment* memungkinkan petugas menetapkan jumlah pembayaran dimana seringkali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini ada potensi terjadi negosiasi besaran pajak yang dibayarkan antara pelaku usaha dan petugas, ada tawar menawar atau

transaksional. Selain itu target penerimaan pendapatan daerah setiap tahun meningkat, tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah tidak meningkat.

Olehnya Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara memikirkan bagaimana agar transparansi pengelolaan pajak daerah dan retribusi dapat terwujud, dan bagaimana mengoptimalkan potensi pajak yang jumlahnya tidak banyak ini di Maluku Tenggara, kemudian lahir sistem pajak *online* ini.

Maksud dilaksanakannya Sistem *Online* Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga wajib pajak dengan alat komunikasi yang dimilikinya dapat mengakses informasi yang disediakan dan mengetahui besaran pajak terhutang, kapan harus membayar dan tempat-tempat mana saja pembayaran pajak dapat dilakukan. Semua urusan itu dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah.

Dengan sistem ini, pemerintah daerah akan menghemat anggaran untuk pengeluaran biaya administrasi dan biaya kepatuhan. Administrasi pajak akan efektif dengan memperkecil kemungkinan ada wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penyelundup pajak dan penunggak pajak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan sistem *online* ini adalah:

- meningkatkan pendapatan daerah;
- menghindari risiko kebocoran pendapatan daerah;
- tersedianya laporan yang sesuai/kompatibel antara data di lapangan dengan data yang terekam di database;
- kemudahan akses data pelaporan dari manapun (*web-service*)
- kemudahan dalam evaluasi kondisi pajak dan retribusi pada masing-masing objek pajak;
- membangun kepercayaan masyarakat (terutama Wajib Pajak dan retribusi) terhadap pemerintah daerah; dan



- mempermudah akses rekonsiliasi data antara instansi terkait yang berbasis teknologi informasi (tidak lagi dengan cara manual).

Sebelum inovasi ini dilaksanakan, Bapenda Maluku Tenggara melakukan kunjungan belajar ke Badung Provinsi Bali, guna mencari tahu lebih jauh perihal pelaksanaan sistem ini. Namun di Badung, ditemukan bahwa jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka besar bukan karena sistem pengelolaan pajak tetapi karena memang Badung memiliki objek/potensi pajak yang banyak khususnya dari sektor pariwisata. Olehnya, pihak Bapenda Maluku Tenggara mengunjungi lagi beberapa daerah lain untuk belajar. Selain itu untuk lebih memudahkan, Bapenda juga menggunakan tenaga konsultan untuk sama-sama membangun sistem ini.

Langkah-langkah yang dilakukan di awal pelaksanaan sistem ini adalah:

- Menyiapkan SDM Pengelola Sistem *Online* Pajak Daerah, meliputi pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi terkait pajak daerah/pendapatan daerah (Studi Banding dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung – Provinsi Bali)
- Melakukan kerja sama (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan *online*

(kiri) *Display* pembayaran pajak via ATM (kanan atas) Sosialisasi Penggunaan *Smart Register* kepada Wajib Pajak (kanan bawah) Pengadaan alat *Smart Register*
Foto: Dok. Bapenda Maluku Tenggara

pembayaran pajak/retribusi daerah;

- Menyiapkan Infrastruktur Sistem *online* Pajak Daerah, meliputi Komputer *Server*, Komputer *Client*, *Printer*, *Smart Register*, dan Koneksi Internet; dan
- Menerapkan pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi *database*, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA).

Tujuan dari inovasi sistem ini adalah untuk optimalisasi potensi sumber pajak dan retribusi, menghindari tawar menawar/transaksional antara petugas dan wajib pajak, menghindari ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka diaplikasikanlah sistem yang menggunakan alat yang disebut dengan *Smart Register*. *Smart register* ini dipasang di tempat-tempat usaha. Sistem *smart register* ini *online*, terhubung dengan semua objek pajak retribusi seperti restoran, hotel, tempat hiburan, termasuk bandara dan terminal.

Smart register mencatat seluruh transaksi secara *real time*. Setiap transaksi akan terbaca dalam sistem yang terhubung dengan Bapenda. Bapenda dapat memantaunya melalui *dashboard* bahkan juga terhubung dengan perangkat android sehingga bisa dipantau dari mana saja.

Peraturan Bupati terkait sistem ini sudah diterbitkan dan disosialisasikan, bahwa ketika masyarakat melakukan transaksi di sebuah tempat usaha dan kasir tidak menggunakan mesin *smart register* maka mereka berhak untuk meminta pelayanan gratis/tidak berbayar dan pelaku usaha akan diberikan sanksi. Dalam hal ini masyarakat juga berperan dalam fungsi pengawasan. Pajak bersumber dari konsumen dan dalam hal ini pengusaha hanya sebagai pengumpul.

Selain dengan sistem *smart register*, sistem pembayaran tidak lagi diserahkan ke petugas. Dengan sistem ini WP langsung membayar ke bank daerah atau Bank Maluku. Sistem ini dikembangkan untuk meminimalisir petugas bersentuhan langsung dengan uang. Olehnya kerja sama sudah dilakukan dengan Bank Maluku di mana wajib pajak bisa melakukan pembayaran via ATM dan SMS *Banking*. Setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di Bank Maluku secara *real time* juga terbaca di *dashoard* Bapenda (data transaksi juga dapat diprint). Jadi sistem ini mengintegrasikan pelaku usaha, Bank Maluku dan Bapenda.

Setelah sistem ini digunakan, penerimaan pajak meningkat. Sebagai contoh salah satu rumah makan. Sebelum ada sistem ini, penerimaan pajaknya hanya di kisaran 500 ribu namun setelah sistem ini digunakan penerimaan pajak mencapai 6 juta rupiah. Tahun 2020 pembayaran pajak bumi dan bangunan juga mulai menggunakan sistem ini.

Sejak mulai diluncurkan di bulan Desember 2018, kenaikan penerimaan berada di kisaran 50 sampai dengan 300% secara total namun untuk rata-rata per objek pajak bisa sampai 600%. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah terutama dari Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2019 sebesar 50% – 100%.

Meski di awal mendapat penolakan dari wajib pajak, namun dengan sosialisasi bahkan sampai dilakukan oleh bupati dan Sekda ke WP, perlahan-lahan WP mulai paham.

Untuk menguatkan inovasi ini terdapat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang sistem *online* pajak dan retribusi daerah yang terkait pajak *online* dan pembayaran pajak dan retribusi yang mengatur sistem pembayaran non tunai. Namun dalam perjalanannya akan dilakukan revisi untuk mengakomodir hal-hal yang belum termuat dengan rujukan UU ITE terkait transaksi non tunai. Sebagai contoh untuk retribusi parkir pasar yang sebelumnya dikelola Dinas Perhubungan, jumlah pendapatan sebulan hanya di kisaran 20 juta rupiah, tetapi ketika dipasang *smart register* dan ditangani Bapenda pendapatan menjadi 100-120 juta rupiah.

Saat ini Bapenda sedang mengembangkan sistemnya agar bisa terintegrasi dengan Dinas Perizinan. Dalam kerja sama ini, ketika wajib pajak mengajukan izin maka pihak Dinas Perizinan dapat melacak dan menelusuri apakah WP sudah melaksanakan kewajiban pajaknya sebelum izin usaha diterbitkan.

Selain itu rencana pengembangan lainnya adalah membuat kartu pajak dan retribusi di mana kartu ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dengan cara digesek pada mesin *smart register*. Pengembangan ini masih sedang dijajaki dengan pihak Bank Maluku, untuk Bapenda sendiri sistemnya sudah siap.

Apa yang dilakukan Bapenda Maluku Tenggara dengan penerapan Sistem Pajak dan Retribusi Online Daerah, memperoleh apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara menempati peringkat 14 Nasional (Zona Hijau) dalam Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari 542 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sungguh sebuah prestasi membanggakan dari sebuah kabupaten kepulauan di Kawasan Timur Indonesia yang jauh dari hiruk pikuk kota dengan berbagai kemajuan informasi dan teknologinya, namun mampu membuat terobosan inovatif dalam peningkatan pendapatan daerahnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut mengenai inisiatif cerdas ini dapat menghubungi info@bakti.or.id

MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI BAGI SISWA SD

Oleh

NURFITRIANA & A. ARIFAYANI

"Katanya tidak boleh!"

"Tidak boleh itu"

suara di dalam kelas bersahutan. Sumbernya berasal dari siswa-siswi yang sedang merespons pertanyaan seorang guru. Sang guru membacakan data di selembur kertas kecil yang disajikan dalam permainan interaktif. Tugas peserta adalah menemukan pasangan dari kertas yang mereka pegang.

Pertanyaannya sederhana, benarkah jika menstruasi anak perempuan tidak diperbolehkan mencuci rambut? Jawaban dari pertanyaan ini tertulis di kertas yang dipegang oleh guru lain.

Saat menstruasi, menjaga kebersihan tubuh harus lebih ekstra termasuk rambut.



Jadi keramas saat menstruasi justru meningkatkan rasa percaya diri. Jawaban tersebut tak pelak memicu sedikit keributan di dalam kelas saat pelatihan guru tentang Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) yang dilaksanakan di SD Negeri Sumanna, Kota Makassar pada tanggal 13 Februari 2021 lalu.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Mitra Ibu dan Anak (LemINA) didukung oleh *New Zealand Head of Embassy Fund 2020* ini diadakan di 20 sekolah dasar terpilih yang ada di kota Makassar. Tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan guru tetapi juga untuk advokasi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM). Lalu seberapa penting MKM ini?



Foto: Dok. LemINA

Laporan WHO-UNICEF pada *Joint Monitoring Programme* Tahun 2012, Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi di mana perempuan memiliki pengetahuan yang benar dan pola hidup yang bersih dan sehat ketika menstruasi, seperti menggunakan pembalut (baik pembalut sekali pakai atau pembalut kain) yang bersih untuk menyerap atau mengumpulkan darah menstruasi, yang dapat diganti sesering mungkin selama durasi periode menstruasi. Ketika di sekolah siswa perempuan dapat mengakses toilet, sabun dan air untuk mengganti pembalut dan membersihkan diri dalam kondisi nyaman dengan privasi yang

Pada haid pertama, atau disebut juga '*menarke*', anak mengalami perubahan besar dalam fase kehidupan mereka. Pada masa pubertas ini anak perempuan mengalami perubahan fisik yang bisa membuat anak merasa malu, ketakutan, cemas dan perubahan emosi lainnya.



terjaga (toilet yang berfungsi, pintu dapat terkunci dari dalam, dan terpisah dengan laki-laki), dan memiliki akses untuk membuang pembalut bekas.

Kegagalan siswa perempuan dalam mengatasi kebutuhan terkait MKM tersebut berkonsekuensi pada kualitas pendidikan, kesetaraan gender, kehidupan sehat dan sejahtera serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak yang pada akhirnya memengaruhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Akses Informasi dan Kualitas Informasi

Data menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak perempuan tidak pernah berdiskusi dengan teman atau orang tua tentang menstruasi sebelum mendapatkan menstruasi pertama (SDKI, 2012). Hal ini menunjukkan kondisi yang umumnya dialami anak perempuan dan mungkin juga kita alami sendiri.

Padahal pada haid pertama, atau disebut juga '*menarke*', anak mengalami perubahan besar dalam fase kehidupan mereka. Pada masa pubertas ini anak perempuan mengalami perubahan fisik yang bisa membuat anak

merasa malu, ketakutan, cemas dan perubahan emosi lainnya.

Pengetahuan yang tidak cukup mengenai menstruasi, siklus menstruasi dan MKM ini membuat kurangnya persiapan anak perempuan menghadapi menarke dan mengelola kebersihan menstruasinya. Di sisi lain, orang tua, saudara, teman atau guru sebagai sumber informasi tentang menstruasi juga tidak bisa memberikan pengetahuan yang akurat dan komprehensif.

Sementara itu di banyak budaya menstruasi dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, ada banyak mitos dan perbedaan pendapat terkait menstruasi karena dianggap negatif, memalukan, kotor, atau bahkan dianggap sebagai penyakit.

Saat di sekolah, anak perempuan menghadapi tantangan yang berbeda lagi. Minimnya pengetahuan guru sebagai sumber informasi utama tentang menstruasi di sekolah serta fasilitas sanitasi yang tidak ramah MKM menjadi beberapa alasannya. Penelitian UNICEF tahun 2015 menunjukkan bahwa satu dari tujuh remaja putri tidak masuk sekolah satu hari atau lebih saat menstruasi.

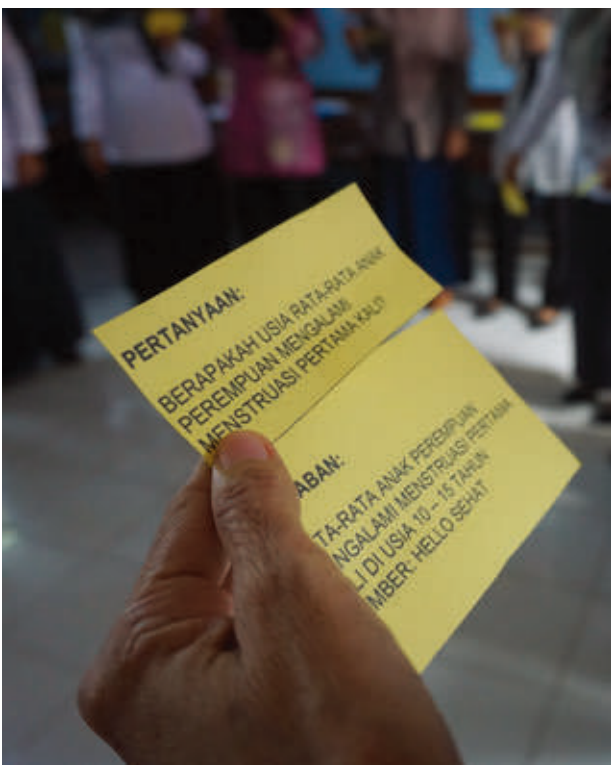


Foto-foto: **Dok. LemINA**

Dimulai dari Sekolah

Pada program pelatihan MKM yang dilaksanakan oleh Yayasan LemINA, guru sekolah dasar dibekali dengan pengetahuan seputar MKM melalui *workshop* pada 3 Februari - 24 Maret 2021.

Tujuan *workshop* antara lain adalah agar guru akan menjadi sumber informasi yang benar dan akurat di sekolah masing-masing. Menjadi pendamping terbaik untuk siswa serta membantu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah MKM.

Di kegiatan *workshop* ini, LemINA menyediakan modul pegangan untuk guru sebagai bahan bacaan pembelajaran MKM dan juga sebagai panduan yang akan digunakan sebagai bahan edukasi bagi siswa kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar.

Untuk media edukasi pembelajaran MKM ke siswa, guru bisa menggunakan video, stiker edukasi MKM LemINA dan buku komik berjudul *Apa Itu Menstruasi* dari UNICEF. Proses edukasi ke siswa akan dilaksanakan oleh guru dengan pendampingan Yayasan LemINA, baik secara jarak jauh maupun tatap muka dengan hari edukasi ditentukan oleh guru di masing-masing sekolah.

Melalui program ini, sekolah juga didorong untuk bisa menciptakan toilet yang ramah MKM dengan penyediaan fasilitas sanitasi berupa pembalut, lemari penyimpanan pembalut, cermin dan tempat sampah. Sekolah juga direkomendasikan untuk memiliki toilet yang terpisah gender agar anak perempuan bisa dengan nyaman mengganti pembalut saat di sekolah.

“Sangat penting mengetahui edukasi MKM untuk diajarkan ke siswa supaya siswa khususnya laki-laki lebih menghargai perempuan dan tidak lagi melakukan hal-hal seperti perundungan (*bullying*) jika mendapati teman perempuannya yang mengalami haid. Siswa perlu ditanamkan sejak dini bahwa menstruasi bagi perempuan adalah hal yang normal,” tutur Pak Marhabang di sesi akhir kegiatan *workshop* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021 di SD Inpres Mangasa 1.

INFORMASI LEBIH LANJUT

A. Arifayani adalah Staf LemINA dan Alumni Program INSPIRASI. Penulis dapat dihubungi melalui email andiarifayani@gmail.com

CERITA DARI PULAU TIGA

Oleh **SYAIFULLAH**

Pagi-pagi, tanah masih basah. Atau tepatnya, lantai papan masih basah. Di Agats, kita tidak terbiasa bertemu dengan tanah. Di seujur kota, papan dan beton adalah tempat berpijak.

Sebagai kota yang dibangun di atas rawa, Agats memang akrab dengan papan. Kota di atas papan, kata orang. Papan yang menjadi jalan raya, menjadi lantai rumah, bahkan menjadi landasan di pelabuhan. Tempat kami berdiri pagitu.

Matahari masih malas menunjukkan sinarnya. Masih tertutup awan kelabu. Angin sisa malam menyapa, sesekali seperti menusuk. Membuat kami harus merapatkan jaket. Saya lirik jam tangan, belum pukul 7 pagi.

Beberapa perahu fiber-atau orang menyebutnya *speed boat*-terparkir di pelabuhan. Terombang-ambing diempas ombak sungai yang tidak seberapa besar. Sungai di depan kota Agats ini memang lebar, mungkin



genap seratus meter antar dua daratan di tepinya. Sungai itu jadi urat nadi kota Agats, ibu kota Asmat. Di atas sungai itulah ratusan kapal melintas setiap hari. Dari kapal kecil punya nelayan, *speed boat* dengan mesin yang lebih modern, sampai kapal Pelni yang disebut Kapal Putih. Sungai adalah jalan tol bagi orang Asmat, serta juga gudang makanan. Ikan, udang, sampai sagu yang hidup di tepiannya adalah ragam pasokan gizi buat orang Asmat. Sungai adalah pusat kehidupan orang Asmat.

Kami meninggalkan dermaga Aswan di Agats sekitar pukul 7 pagi. Melintasi sungai besar menuju muara, menuju laut lepas lalu



Foto: Syarifullah/Wayasan BaKTI

berbelok ke arah barat laut, menuju Kabupaten Mimika.

Bukan, kami bukan mau ke Mimika tapi ke Distrik Pulau Tiga yang memang berbatasan langsung dengan Mimika. Pulau Tiga adalah salah satu distrik terluar Kabupaten Asmat. Berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga dan lebih dekat ke Kota Timika daripada ke Agats. Di sanalah kami akan menghabiskan waktu dua malam. Tepatnya di Kampung Nakai, ibu kota Distrik Pulau Tiga.

Langit mendung sepanjang perjalanan. Matahari hanya mengintip sebentar, lalu

menghilang lagi. Sesekali butiran air jatuh dari langit, membasahi kami yang sedang melintasi sungai dan lautan. Beruntung karena ombak tenang, tidak sampai menerbitkan rasa khawatir. Sesekali *speed boat* harus berhenti, sang supir memasang atap untuk menjaga kami tidak sampai basah kuyup. Persis seperti mobil *convertible*. Sayangnya, atap *speed boat* itu tidak terlalu tinggi dan tentu saja membuat kami merasa terkungkung dengan pandangan yang terbatas. Sang supir sampai harus lebih berhati-hati. Ketika hujan berhenti sejenak, dia pun akan berhenti dan melipat atap kembali. Tapi bila hujan kembali datang dan



cukup deras, dia akan kembali berhenti dan memasang atap. Begitu terus sampai beberapa kali.

Si supir membawa kami menyusuri tepian laut Arafuru, lalu berkelok tajam di satu titik. Menyusuri sungai kecil yang di kanan-kirinya penuh dengan pepohonan. Ada rasa ngeri yang menyusup ke dada. Membayangkan di antara pepohonan itu ada buaya atau hewan buas lainnya yang mengintai, lalu di saat yang tepat melompat dan menerkam. Sepertinya saya terlalu banyak menonton film.

Speed boat masih meliuk-liuk di sungai kecil, menghindari kayu yang hanyut, atau ranting pohon yang menjorok ke sungai. Sampai akhirnya kami kembali ke sungai besar yang teduh dengan jarak ratusan meter antar tepiannya. Sudah masuk jalan raya, kata saya dalam hati.

Kemampuan mengenal jalur memang mutlak dimiliki para supir *speed boat*. Tidak ada tanda-tanda khusus di tepian sungai, tidak ada rambu, tidak ada papan penunjuk jalan. Semua berdasarkan ingatan saja. Salah memilih anak sungai, kami bisa-bisa malah makin jauh ke dalam hutan dan bukannya bertemu sungai besar.

Tiba di Pulau Tiga

Satu jam empat puluh lima menit setelah meninggalkan dermaga Aswa di Agats, kami akhirnya bertemu dengan dermaga kecil di tepi kampung. Kampung Nakai, ibu kota Pulau Tiga sudah di depan mata. Perjalanan panjang yang syukurnya tidak separah yang kami bayangkan. Ombak tenang, hujan pun tidak terlalu mengganggu. Ini perjalanan terpanjang kedua saya dengan *speed boat* setelah perjalanan ke Koroway setahun yang lalu.

Kami turun dari *speed boat*, menjejak tanah yang basah sebentar sebelum naik ke dermaga kayu. Beberapa pria menyambut kami, membantu mengangkat barang-barang yang kami bawa. Hanya tas pakaian dan beberapa dus berisi air mineral. Mereka membawanya ke dalam kampung, ke tempat teman-teman lain yang sudah lebih dulu datang. Kami mengikutinya.

Kampung Nakai tidak terlalu luas dan tidak ramai. Hanya ada 1 kios pendatang yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ada 1 sekolah SD di kampung itu. Kondisinya tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu bagus.



Foto: Syaifulah/Wayasan BaKTI

Pak Baharuddin, seorang pria asal Bulukumba berumur 42 tahun menjadi kepala sekolah di sana. Dia sudah merantau sejak tahun 90an ke Asmat dan sudah berpindah tugas beberapa kali sebelum akhirnya ditempatkan di Nakai sejak tiga tahun lalu. Dialah yang mengepalai sekolah kecil itu, dibantu empat orang guru yang dua di antaranya adalah perempuan. Murid mereka tidak terlalu banyak, bercampur antara anak-anak yang memang masih berusia SD dengan anak-anak yang sudah terlihat dewasa dan tidak sesuai dengan anak seusia dia untuk duduk di bangku SD.

Di bagian belakang kampung, sebuah Puskesmas berdiri. Puskesmas itu masih terlihat mengkilap, masih baru. Di dekatnya beberapa rumah dinas dokter dan suster berjejer. Puskesmas itu memang baru berusia setahun, karena Distrik Pulau Tiga pun memang masih tergolong muda. Seorang dokter bertugas di sana bersama beberapa suster dan bidan. Sang dokter kebetulan sedang berada di Agats ketika kami datang, tapi di rumah dinasnyalah kami dan rombongan tinggal.

Rumah kayu, seperti umumnya rumah di Asmat. Berdiri di atas tiang-tiang setinggi dua meter dari tanah. Seperti umumnya rumah di Asmat.

Kami langsung menuju gereja yang jadi pusat kegiatan hari itu. Gereja itu disulap menjadi tempat pelayanan. Beberapa orang sibuk di belakang laptop, memverifikasi data yang masuk, beberapa lainnya membagikan dana bantuan, dan beberapa petugas Puskesmas memberikan layanan kesehatan di luar gereja. Bayi dan balita diberi imunisasi, ibu-ibu diberi vitamin dan obat pencegah kaki gajah. Mereka pun diberi pemahaman tentang gizi dan kebersihan. Suasana riuh dan terasa gerah. Hujan yang barusan pergi meninggalkan rasa gerah yang mengambang di udara.

Tantangan Kesehatan

“Memang masalah kebersihan masih jadi kendala di sini,” kata Mate Yyongarut, salah seorang suster senior dari Puskesmas Nakai. “Kadang ibu-ibu belum peduli untuk kasih mandi de pu anak. Tidak pernah ganti de pu baju juga. Jadi kasihan, anak-anak itu badan jadi kotor, bau dan suka sakit kulit,” sambungnya lagi.

Saya perhatikan, pada umumnya anak-anak yang ada dalam gendongan ibunya atau berlarian di antara orang-orang itu memang seperti tidak terawat. Kalau pakai standar orang kota, maka



Foto: Syaifulah/Yayasan BaKTI

mereka sepertinya tidak pernah mandi secara teratur, pun pakaian yang mereka pakai dibiarkan begitu saja meski sudah kotor dan kusam.

“Mama, ini ko ambil sabun e. Ko kas mandi itu ko pu anak, baru itu baju cuci kalau su kotor. Ganti deng baju yang bersih,” kata seorang petugas Puskesmas kepada seorang ibu. Si ibu hanya mengangguk sambil tersenyum malu.

Seorang anak kecil, mungkin berumur sekitar 10 tahun melintas di depan saya, di tangannya ada sekotak minuman energi.

“Anak-anak sini memang suka sekali minum Kuku Bima. Dulu mereka suka yang rasa anggur, tapi sekarang lebih banyak yang beli rasa jeruk,” kata pak Baharuddin sang kepala sekolah asal Bulukumba itu.

Saya meringis, membayangkan betapa tingginya risiko yang diterima anak-anak itu. Bayangkan, minuman energi dengan tingkat kafein dan glukosa yang tinggi itu dikonsumsi oleh anak-anak, secara berlebihan. Berlebihan karena mereka mengonsumsinya setiap hari, kadang dengan jumlah yang tidak masuk akal. Lebih dari satu saset per hari. Orang dewasa saja bisa menderita gangguan jantung atau penyakit

lainnya bila mengonsumsi dengan takaran seperti itu, apalagi anak-anak.

“Di tempat saya sudah ada beberapa anak-anak kecil yang meninggal karena gagal ginjal. Saya pikir, itu karena konsumsi minuman energi yang berlebihan,” kata dr. William, seorang dokter muda yang bertugas di Asmat. Dia bertugas di salah satu kampung sebelah utara kota Agats, berbatasan langsung dengan Yahukimo.

Bukan Karena Miskin

Cerita-cerita seperti itu memang sudah sering saya dengar. Itu jadi tantangan kesehatan terbesar di Papua. Bukan kemiskinan, tapi pemahaman yang salah akan kesehatan dan kebersihan. Masih banyak warga yang salah memahami kalau makanan modern itu semua baik. Mereka mungkin merasakan lezatnya mie instan atau manisnya minuman berenergi. Tapi, mereka tidak tahu kalau di baliknya ada ancaman yang besar untuk mereka, untuk anak-anak mereka.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email: ipul.ji@gmail.com

Pembangunan Pertanian Menjadi Strategi Menurunkan Kemiskinan di Lombok Timur Masa Pandemi

Oleh **MAHARANI**

Di masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan semua sektor pembangunan mengalami penurunan pertumbuhan. Bahkan, ada yang sampai minus. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat, tak terkecuali di Lombok Timur.

Pada Desember 2019 yang lalu, jumlah penduduk miskin di Lombok Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur sebanyak 193.650 orang atau 16,15%. Sedangkan garis kemiskinan berada pada sekitar 430 juta rupiah per kapita per bulan.

Dilihat dari kacamata ekonomi, hanya sektor pertanian dan perdagangan yang masih bertahan di masa pandemi ini. Pertanian memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang sangat sulit ini. Terutama peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. BPS menyebutkan pada Maret 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,71 persen di perkotaan dan 74,73 persen di pedesaan.

Selama September 2019 dan Maret 2020, garis kemiskinan mengalami kenaikan. Dari 414 juta rupiah per kapita per bulan pada September 2019 menjadi 430 juta rupiah per kapita per bulan



Foto: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.

pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Melihat hal tersebut, di masa pandemi ini akan berpengaruh terhadap sendi kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mengapa begitu? Perekonomian

yang lesu, menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengurangi beban perusahaan. Selain itu, pola pembelian konsumen yang berubah akibat dari kebijakan *Social Distancing*. Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

Banyak sektor perekonomian yang mengalami keterpurukan sejak wabah pandemi ini hadir. Mulai dari sektor *real estate* yang sepi pembeli, sektor hiburan yang mengalami pemberhentian sementara, sektor barang dan jasa yang mengalami penurunan permintaan, dan masih banyak lainnya. Namun tanpa kita sadari, ada salah satu sektor dari sekian sektor lainnya yang tidak mengalami kerugian. Bahkan dapat dikatakan untung akibat dari pandemi COVID-19 yaitu sektor pertanian.

Memang pertanian memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Lombok Timur. Namun, pertanian tidak bisa berdiri sendiri. Ada sektor lain yang menjadi pendukungnya, seperti

transportasi dan pariwisata, terutama perhotelan dan jasa restoran. Jika hal ini mengalami kontradiksi, maka akan berpengaruh pula kepada sektor pertanian ini.

Pada kondisi keadaan apapun, manusia akan tetap mempertahankan kebutuhan pangan masing-masing. Hal tersebutlah yang sangat mendasar sehingga sektor pertanian tidak mengalami pengaruh dan perubahan yang cukup berarti pada kondisi pandemi COVID-19.

Hasil dari produk sektor pertanian adalah sayuran dan buah-buahan, yang mana kedua produk tersebut terus mengalami permintaan yang sangat signifikan sejak wabah pandemi COVID-19 melanda. Selain dikarenakan himbuan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan.

Pergeseran masa panen dari Maret menjadi April sehingga puncak panen padi terjadi pada triwulan kedua 2020 juga memberikan hal yang positif bagi pertanian di masa pandemi ini. Sementara itu ditinjau dari sisi epidemiologi, virus Corona mayoritas menyebar di perkotaan atau kawasan padat penduduk. Artinya, pertanian yang mayoritas tidak berada di perkotaan relatif lebih aman.

Pandemi COVID-19 memiliki potensi yang bisa menyebabkan krisis pangan global. Rantai pasokan pangan terancam di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan perjalanan. Kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi pangan. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat.

Lombok Timur harus berani membuat suatu terobosan konkrit di bidang pertanian ini untuk menghambat peningkatan jumlah kemiskinan di daerah. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi petani melalui kebijakan input dan memberikan insentif bagi harga komoditi andalan daerah.

Hasil dari Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menyebutkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lombok Timur mencapai 170 ribu atau mencapai 567 ribu jumlah anggota rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki profesi sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.

Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani merupakan bantuan berupa benih/bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan yang merupakan bantuan agar petani bisa mandiri. Anggaran tersebut menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberpihakan terhadap petani kecil pun harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang penyuluh untuk terus mendampingi petani. Penyuluh pertanian dapat memanfaatkan teknologi informasi digital sehingga pendampingan bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Tidak hanya satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang harus berbuat. Semua SKPD pun harus fokus dalam menjalankan program yang dibuat. Jangan ada ego sektoral yang terjadi. Program harus terkoneksi dan melibatkan semua pihak seperti akademisi, sektor swasta maupun lembaga sosial yang ada di daerah.

Semoga dengan adanya program yang langsung efektif terhadap petani memberikan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Direktur Lombok Research Center (LRC) dan Koordinator Forum KTI Wilayah Nusa Tenggara Barat dan dapat dihubungi melalui email maha_prof80@yahoo.co.id

Artikel ini telah dimuat sebelumnya di

<https://massmedia.id/pembangunan-pertanian-menjadi-strategi-menurunkan-kemiskinan-di-lombok-timur-pada-masa-pandemi>

Setahun Pandemi: Ini 5 Riset COVID-19 Penting di Indonesia Agar Kita Tak Terperosok Berulang Kali

Oleh **IRWANDY**

Pada awal Maret ini, genap setahun pandemi COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia. Selama setahun ini, pemerintah menerbitkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan pandemi.

Namun hingga kini belum ada kebijakan yang efektif untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Hingga awal Maret 2021, pandemi ini telah memakan korban jiwa lebih dari 36 ribu jiwa dan 1,3 juta lebih orang terinfeksi di negeri ini. Ini jumlah kasus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara.

Satu tahun pandemi merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk kembali mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan. Agar lebih efektif, kebijakan yang diambil haruslah berbasis bukti.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti, berbagai riset ilmiah baik yang berskala internasional dan nasional dapat

menjadi bahan masukan untuk merumuskan perbaikan kebijakan ke depan.

Dalam tahap evaluasi kebijakan, setidaknya ada dua pertanyaan besar yang berusaha dijawab yakni bagaimana kondisi pencapaian saat ini dan perbaikan apa yang harus dilakukan ke depan.

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, saya merangkum lima hasil penelitian yang dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi pencapaian kita saat ini dan apa yang harus dilakukan ke depan. Lokasi dan sampel riset ini diambil di Indonesia.

Posisi Indonesia di Level Internasional

Pada awal Januari lalu, Institute Lowy yang berbasis di Sydney menerbitkan sebuah riset global, *COVID-19 Performance Index; Deconstructing Pandemic Responses*, untuk menilai kinerja penanganan pandemi COVID-19 di 98 negara, termasuk Indonesia.

Ada enam indikator utama yang digunakan dalam riset ini untuk pemeringkatan negara yakni (1) jumlah kasus yang dikonfirmasi, (2) kasus yang

dikonfirmasi per juta orang, (3) kematian yang dikonfirmasi, (4) kematian yang dikonfirmasi per juta orang, (5) kasus yang dikonfirmasi sebagai proporsi tes, dan (6) tes per seribu orang.

Puluhan negara dievaluasi dengan skor hasil penilaian berkisar antara 0-100. Skor 0 (nol) berarti terburuk dan skor 100 berarti terbaik.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan Selandia Baru mencapai skor 94,4 Vietnam 90,8 dan Taiwan 86,4. Ketiganya menduduki tiga teratas. Indonesia hanya mendapatkan skor 24,7 dan menjadi urutan ke-13 dari bawah dalam penilaian ini.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa tingkat perkembangan ekonomi atau sistem politik negara tidak berpengaruh banyak dalam meningkatkan kinerja penanganan pandemi.

Faktor seperti populasi kecil (kurang dari 10 juta), tingginya kelekatan (kohesifitas) masyarakat serta adanya berbagai lembaga negara yang kompeten lebih menunjukkan hubungan yang kuat dalam meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 sebuah negara.

Dari temuan ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki kelemahan dari sisi populasi penduduk yang sangat besar serta kemampuan sistem kesehatan yang masih tidak merata. Namun, di sisi lain kita memiliki potensi yang selama ini masih kurang dimaksimalkan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan pengendalian COVID-19 yakni struktur kelekatan atau keeratan masyarakat.

Karena itu, kini saatnya pemerintah membuat kebijakan penanganan pandemi ke depan lebih menekankan pada upaya-upaya untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai kearifan lokal yang berkembang di masing-masing daerah.

Kondisi Sistem Kesehatan dan Perbaikan yang Dibutuhkan

Pada awal 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan sebuah buku bunga rampai studi berjudul Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia.

Studi ini memberikan gambaran bagaimana lemahnya sistem kesehatan kita saat ini dalam menghadapi pandemi.

Dari sisi kapasitas keamanan kesehatan ditemukan bahwa sistem surveilans di Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik. Integrasi data antardaerah dan pusat juga masih menjadi permasalahan.

Selain itu, keterampilan sumber daya manusia di daerah khususnya dalam hal pengelolaan data surveilans juga masih rendah. Kapasitas pemeriksaan laboratorium juga saat ini masih belum maksimal ditandai dengan belum mampunya sistem pemeriksaan berjalan 24 jam sehari sehingga masih belum memenuhi standar yang ditargetkan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia.

Sisi kapasitas pelayanan kesehatan juga masih memperlihatkan beberapa kelemahan. Dimulai dari sumber daya manusia kesehatan yang terbatas baik dari segi kuantitas, kualitas hingga distribusi.

Kapasitas perawatan COVID-19 baik ruang isolasi maupun ruang rawat intensif sangat kurang bila lonjakan kasus terjadi. Fasilitas pengolahan limbah medis sangat terbatas dan sebarannya belum merata di seluruh wilayah.

Sistem rujukan yang ada saat ini belum adaptif dalam menghadapi kondisi lonjakan kasus (seperti pada masa pandemi).

Kondisi Perilaku Masyarakat dan Intervensi yang Diperlukan

Salah unsur utama keberhasilan pengendalian pandemi adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 pada 7-14 September 2020 dengan jumlah responden 90.967 orang. Dari riset ini sejumlah catatan penting dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia.

Survei ini menemukan dua alasan utama kenapa masyarakat Indonesia saat ini masih kurang patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.



Pertama, karena tidak adanya sanksi (55%) dan yang kedua adalah karena anggapan tidak adanya kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar mereka (39%).

Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan tindakan yang paling efektif adalah adanya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, kejelasan dan transparansi informasi terkait kondisi pandemi di lingkungan terkecil tempat tinggal masyarakat seperti RW/RT harus disosialisasikan dengan baik ke masyarakat sekitar.

Dengan adanya kejelasan dan transparansi informasi terkait kondisi di wilayahnya maka masyarakat akan bisa lebih waspada. Hal ini sesuai dengan hasil survei BPS yang menemukan bahwa respons yang paling banyak dilakukan masyarakat ketika ada yang terinfeksi COVID-19 di lingkungan sekitarnya adalah memperketat protokol kesehatan.

Pemerintah saat ini perlu lebih fokus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya di pasar tradisional/pedagang kaki lima dan angkutan umum angkot/mikrolet. Hal ini harus dilakukan karena berdasarkan hasil survei BPS, tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang paling banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Peziarah berdoa di depan makam keluarganya di pemakaman khusus dengan protokol COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur, 2 Maret 2021. Pemakaman ini telah penuh terisi 1.050 jenazah yang meninggal akibat COVID-19.

Foto: **ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat/wsj.**

Dalam upaya perubahan perilaku, pemerintah perlu lebih fokus untuk memanfaatkan saluran media sosial, televisi, dan WhatsApp. Saluran ini merupakan media terpopuler yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai protokol kesehatan dan pentingnya mencegah penyebaran COVID-19.

Survei ini juga menemukan bahwa populasi pada rentang umur 17-30 tahun perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Perhatian ini sangat penting karena di antara kelompok masyarakat yang memiliki persepsi bahwa mereka tidak mungkin mereka dapat tertular COVID-19, mayoritas berasal dari kelompok umur ini (20,2%).

Dampak pada Populasi Rentan

Selain membawa dampak langsung yakni tingginya angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, pandemi saat ini juga telah membawa dampak tidak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Khususnya pada kelompok ibu dan anak.

Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada dan 12 universitas lainnya menggelar survei monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak pada era pandemi di 120 kabupaten dan kota di Indonesia. Survei mereka menemukan bahwa pandemi ini telah membawa dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Dari 120 kabupaten dan kota yang disurvei, terdapat 59 dinas kesehatan kabupaten/kota yang masuk dalam kategori terdampak sedang, 46 dinas kesehatan kabupaten/kota termasuk dalam kategori ringan dan 15 dinas kesehatan kabupaten/kota termasuk dalam kategori terdampak berat.

Sepanjang 2020, pelayanan kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah tersebut tidak berjalan dengan baik akibat beberapa kendala seperti adanya pembatasan kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala lainnya, banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi dan adanya ketakutan masyarakat khususnya ibu dan anak untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga posyandu.

Kendala-kendala itu menyebabkan sepanjang 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Juga terjadi menurunnya jumlah bayi dan balita yang dipantau pertumbuhannya hingga terganggunya cakupan jumlah imunisasi dasar lengkap.

Survei ini juga menemukan bahwa 28,3% kabupaten/kota mengalami peningkatan angka kematian ibu dan anak pada 2020 akibat dampak tidak langsung dari pandemi.

Sebelum permasalahan ini semakin membesar ke depan, berbagai program-program inovasi untuk mengejar ketertinggalan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak pada 2020 harus segera dilakukan.

Saat ini pemerintah kabupaten dan kota membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mengejar berbagai ketertinggalan tersebut baik dari segi peningkatan kapasitas dan inovasi pelaksana di lapangan hingga pendanaan.

Tantangan Vaksin Ke Depan

Di tengah upaya pemerintah saat ini untuk segera mengakhiri pandemi dengan program vaksinasi nasional, sebuah studi menarik yang belum direview rekan sejawat di *server Medrxiv*, BMJ Yale, *Mathematical Models for Assessing Vaccination Scenarios in Several Provinces in Indonesia*, yang dilakukan di tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat), memperlihatkan hasil yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia.

Dengan pemodelan matematika, tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan empat universitas lainnya menyatakan bahwa di Indonesia kemungkinan akan terjadi lebih dari satu puncak wabah walau diprediksi puncaknya tidak akan sebesar yang pertama.

Oleh karena itu, menurut riset ini, waktu yang tepat melakukan program vaksinasi adalah pada tahap awal pandemi. Vaksinasi pada waktu tersebut akan menekan jumlah kasus aktif dan kematian dengan segera. Setelah jumlah kasus aktif mencapai puncaknya, pelaksanaan program vaksinasi tidak akan mengurangi jumlah kematian secara signifikan.

Selain itu, program pemberian vaksinasi harus dilakukan secara konsisten dan cepat. Agar vaksinasi bisa lebih efektif mengurangi angka kematian secara signifikan, penyuntikan vaksin harus menasar prioritas orang dewasa yang aktif dan juga yang lebih tua (di atas 50 tahun).

Dari lima riset itu, cukup jelas bahwa bukti-bukti ilmiah lebih dari cukup untuk menyusun kebijakan yang efektif mengendalikan pandemi dan mengurangi dampaknya.

Kita membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pengambil kebijakan dari level presiden hingga kepala daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan berbasis bukti.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
Artikel ini bersumber dari situs web *the Conversation.com* dapat diakses melalui tautan <https://theconversation.com/setahun-pandemi-ini-5-riset-covid-19-penting-di-indonesia-agar-kita-tak-terperosok-berulang-kali-156322>



TANTANGAN SEKTOR MANUFAKTUR: KUALITAS BENANG & UPAH PENENUN RENDAH

Oleh **RAHMAD SABANG**

Dndustri persuteraan alam memiliki tahapan produksi berjenjang sebelum tiba di tangan konsumen. Bermula dari budi daya murbei, ulat sutra di sektor hulu, dilanjutkan dengan sektor manufaktur dengan kegiatan inti adalah pemintalan dan penenunan. Proses pemintalan benang dilakukan melalui rangkaian aktivitas penting seperti memasak kokon, memintal benang dan lainnya. Situasi sektor manufaktur tak kalah memprihatinkannya. Hasil kajian kolaborasi rantai nilai komoditas



Foto: Ichtan Djunaed/Yayasan BaKTI

sutra Sulawesi Selatan oleh BAPPELITBANGDA provinsi bersama BaKTI, LSM Payopayo dengan dukungan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) kerja sama BAPPENAS dan Pemerintah Australia, mengungkap realitas terkini.

Sektor manufaktur dengan kegiatan inti pemintalan dan penenunan memiliki masalahnya masing-masing. Kualitas benang sutra Sulawesi Selatan, yang dihasilkan dari pemintalan rakyat kian sulit mengejar kebutuhan pasar, yang menginginkan produk sutra berkualitas. Indikasinya, benangnya pendek, tidak rata dan mudah putus. Beragam faktor berpengaruh, pertama adalah kualitas bahan baku (kokon) warisan dari sektor hulu, kualitasnya rendah, kuantitasnya terbatas. Inilah

masalah utama yang dihadapi pemintal. Pada sektor manufaktur sendiri, masalah utamanya adalah alat pemintal yang masih tradisional, pemintalan milik rakyat belum menyesuaikan dengan standar kebutuhan industri tekstil. Sejak dulu sekali, sampai sekarang, satu-satunya sentuhan teknologi yang membanggakan adalah proses penarikan benang dari kokon ke dalam gulungan benang menggunakan dinamo listrik berkapasitas 100 VA, sebelumnya ditarik manual menggunakan alat seadanya. Di kabupaten Soppeng, sudah ada 18 unit mesin *reeling* atau pemintal, bantuan pemerintah. Mesin *reeling* mempermudah proses, namun tidak merubah kualitas benang.

Pemintalan semi otomatis milik UPT Tekstil Pemerintah Provinsi, dan milik UPTD Persuteraan Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, dan mesin pemintal milik PT. Perhutani tidak lagi beroperasi, karena ketiadaan bahan baku yaitu kokon.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas benang adalah proses penarikan benang dari kokon. Tahapan ini sangat penting, memerlukan teknik dan keterampilan khusus. Kesalahan menarik ujung serat benang dapat menyebabkan benang sutra sulit terurai dan putus. Setelah ujung benang ditemukan, serat benang dikaitkan pada alat peluncur dan haspel (alat penggulung benang yang terbuat dari pipa paralon berukuran 3 inci sepanjang 10 cm), setelah itu mesin *reeling* akan menarik serat benang hingga kulit kokon hanya menyisakan pupa (ulat dalam kokon). Apabila selama prosesnya ada benang yang putus, ujung benang harus disambung kembali dan melanjutkan pemintalan. Ciri benang berkualitas, serat benang kokon yang dipintal tidak pernah putus. Praktiknya pada usaha pemintalan rakyat, frekuensi putus benang dalam satu kokon antara 10-100 atau lebih. Produksi benang yang dihasilkan tenaga *reeling* dalam satu hari (sekitar 8 jam) berkisar 1,25 kg benang (*raw silk*), namun bisa kurang jika benang yang dipintal sering putus. Keseluruhan proses pemintalan sepenuhnya dilakukan oleh perempuan.

Inilah tantangan pada aspek pemintalan. Untuk meningkatkan kualitas benang,



(atas) Mesin pemintal semi otomatis milik pemerintah yang tidak lagi beroperasi, karena ketiadaan bahan baku yaitu kokon. (kanan). Proses penarikan benang dari kokon ke dalam gulungan benang menggunakan dinamo listrik berkapasitas 100 VA.
Foto: Dok. Tim Peneliti Kajian Rantai Nilai Sutra

pilihannya adalah menata sektor hulu, untuk menghasilkan kokon berkualitas, dan dukungan alat pemintal otomatis yang sesuai standar industri. Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, telah meresponsnya, dengan program pengadaan mesin pintal modern otomatis berkapasitas 200 mata pintal di Kabupaten Wajo, dan mesin pintal semi otomatis berkapasitas 80 mata pintal untuk Kabupaten Soppeng. Pengadaan mesin dialokasikan melalui APBD provinsi tahun 2021. “Satu kebutuhan sudah terjawab”, demikian H. Ahmadi Akil, MM, Kepala Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan, merespons rekomendasi hasil kajian pada pertemuan tindak lanjut yang dilaksanakan di kantor BAPPELITBANGDA Sulawesi bersama OPD terkait di provinsi, dan tim pelaksana kajian pada awal Maret 2021.

Impor Benang

Produksi benang Sutra Sulawesi Selatan kualitasnya rendah, kuantitasnya pun terbatas, belum bisa diandalkan menopang kelangsungan industri sutra di Sulawesi Selatan. Upaya melanjutkan tenun sebagai industri dan aktivitas tradisi, oleh pengusaha tenun Wajo memilih impor dengan benang sutra asli, atau sejenis *vicecose* atau poliester, untuk menutup kebutuhan benang. Sayangnya, tidak ditemukan data benang impor dan kualifikasinya yang dipasok ke Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Pastinya, produksi benang sutra Sulawesi Selatan belum layak digunakan untuk melengkapi satu dari dua jenis benang yang untuk industri tenun. Sederhananya, dalam industri tenun ada dua kategori benang, yaitu benang lusi dan benang pakan. Benang lusi, memanjang ke arah panjang kain, sementara benang pakan melintang ke arah lebar. Industri tenun membutuhkan keduanya. Untuk memenuhi kebutuhan benang lusi, pengusaha tenun terpaksa mengimpor, benang sutra lokal hanya cocok untuk benang pakan.



Penenun dan Tantangannya

Setidaknya ada dua aspek mencolok, temuan kajian ini, dinamika usaha dan sistemnya. Dinamika usaha antara lain adalah berkurangnya pesanan. Ini masalah besar bagi pengusaha tenun berskala kecil. Mereka sangat bergantung pada arus uang tunai yang cepat, menjadi pukulan dengan berkurangnya pesanan. Mengambil risiko memproduksi tanpa pesanan bukan yang baik. Harga bahan baku naik, harga jual produk tetap. Masalah ini juga dihadapi oleh pengusaha kecil yang menghadapi naiknya harga benang dengan mengurangi keuntungan. Bertambahnya saingan juga merupakan masalah sendiri. Penenun pekerja beralih menjadi mandiri. Pengusaha menyebabkan kehilangan tenaga kerja, dan menambah saingan baru. Terakhir adalah, plagiasi motif kain/sarung dalam industri tenun sutra. Namun pengusaha tidak bisa menindak pelakunya. Strategi menghadapinya adalah menjual motif yang sama dengan harga lebih rendah dari barang tiruannya.

Penenun dan Upah Rendah

Penenun, ada tiga kategorinya, penenun langganan, penenun pekerja, dan penenun mandiri. Penenun langganan bekerja di rumah sendiri, mengerjakan pesanan pengusaha sekaligus pemilik alat tenun bukan mesin (ATBM). Penenun bekerja adalah yang bekerja pada majikan, di tempat yang disediakan pengusaha, bahkan ada yang tinggal di rumah majikan. Penenun mandiri, tidak terikat pengusaha, banyak dilakoni para penenun yang memakai alat tenun tradisional (walida atau gedogan); sebagian penenun mandiri dengan ATBM. Penenun walida tidak ingin dikejar waktu oleh para pemesan, mereka akan menentukan durasi pengerjaan pesanan, mereka juga menentukan harga produk sendiri. Mereka melakukan seluruh proses penenunan setelah membeli benang sutra, sebagian mereka hanya mengerjakan kain sutra. Ketika penenun bola-bola yang menerima pesanan dari atasan, pelan-pelan berpindah ke benang non-sutra, merekalah yang mempertahankan keberadaan



Foto: Dok. Tim Peneliti Kajian Rantai Nilai Sutra

tenun kain/sarung sutra asli. Mereka biasanya menenun selama satu sampai dua bulan untuk satu lembar sarung.

Inilah uniknya industri Sutra Sulawesi Selatan, dari hulu ke hilir, didominasi perempuan. Perempuan terlibat sejak di hulu, budidaya murbei dan pemeliharaan ulat. Pada sektor manufaktur hingga hilir, seluruh prosesnya dilakukan perempuan. Apalagi penenun, pasti perempuan, mereka mulai menenun tak lama setelah menyelesaikan sekolah. Di Kampung Sutra BNI, penenun berusia di atas 50 tahun umumnya hanya pernah bersekolah sampai SD, sebagian tamat dan sebagian lagi tidak. Profesi penenun sudah menjadi 'budaya tradisional' di Wajo. Praktik ini lazim yang dijalankan banyak anggota masyarakat, khusus perempuan, secara turun-temurun.

Realitasnya, penenun langganan dan penenun pekerja tidak mendapatkan hak-hak layaknya pekerja, sistem upah yang rendah. Upahnya dibayar berdasarkan pesanan, dengan

kisaran 25 - 35 ribu rupiah per sarung, yang mereka kerjakan rerata 3 hari, apabila dikonversi dalam upah harian, jadinya 10 ribu rupiah per hari. Tidak perlu disandingkan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan, yang ditetapkan sebesar sekitar 2,8 juta rupiah per bulan pada tahun 2019. Walaupun di sisi lain mereka memiliki posisi tawar, bekerja atau tidak, menerima atau menolak order dari pengusaha, tentunya dengan konsekuensi tanpa pendapatan. "Kebebasan hampa" penenun menempatkan perempuan sebagai korban ketidakadilan dalam hiruk pikuknya industri sutra. Berbanding terbalik dengan perannya yang sangat dominan dalam industri sutra dari hulu ke hilir. Situasi ini menunjukkan, belum adanya dukungan sistem kebijakan bagi pekerja di sektor tenun, yang merawat tradisi dan budaya Sulawesi Selatan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut mengenai Program Kebijakan Berbasis Bukti dapat menghubungi info@bakti.or.id

Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati setiap tahunnya di dunia pada tanggal 21 Februari. Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional diselenggarakan untuk mempromosikan kesadaran akan keanekaragaman bahasa dan budaya, serta untuk mempromosikan multi bahasa.

Pada awalnya, ide untuk merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional adalah inisiatif dari Bangladesh yang disetujui pada Konferensi Umum UNESCO 1999 dan telah diamati di seluruh dunia sejak tahun 2000. Deklarasi tersebut muncul sebagai penghormatan terhadap Gerakan Bahasa yang dilakukan oleh orang Bangladesh (saat itu orang Pakistan Timur) (tirto.id, 15/2/2021).

Pada tahun 1948, Pemerintah Pakistan saat itu mendeklarasikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa nasional Pakistan, meskipun bahasa Bengali atau Bangla digunakan oleh mayoritas masyarakat di Pakistan Timur, yang

kini menjadi negara Bangladesh. Rakyat Pakistan Timur memprotes, karena mayoritas penduduknya berasal dari Pakistan Timur dan bahasa ibu mereka adalah Bangla. Orang Bangladesh waktu itu menuntut Bangla menjadi setidaknya salah satu bahasa nasional, selain Urdu (tirto.id, 15/2/2021).

Hari Bahasa Ibu Internasional adalah hari libur nasional di Bangladesh. Resolusi tersebut disarankan oleh Rafiqul Islam dan Abdus Salam, Bengali yang tinggal di Vancouver, Kanada. Mereka menulis surat kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada 9 Januari 1998, dan memintanya mengambil langkah untuk menyelamatkan bahasa-bahasa dunia dari kepunahan dengan mengumumkan Hari Bahasa Ibu Internasional. Dalam mandatnya untuk perdamaian, Hari Bahasa Ibu Internasional diharapkan bekerja untuk melestarikan perbedaan budaya dan bahasa yang menumbuhkan toleransi dan rasa hormat terhadap orang lain (tirto.id, 15/2/2021).

Konsep Hubungan Bahasa dan Budaya dalam Masyarakat Demokratis

Oleh **SAMUELLA CHRISTY**



Seiring berkembangnya zaman, kita semakin melihat bahwa pendidikan multi bahasa adalah sesuatu yang penting, dengan tetap melestarikan bahasa ibu. Masyarakat multi bahasa dan multikultural hadir melalui bahasa mereka yang menyebarkan dan melestarikan pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan. Keanekaragaman bahasa tidak dapat dipisahkan dari keanekaragaman budaya. Ditinjau dari segi budaya, bahasa termasuk aspek budaya. Kekayaan bahasa merupakan sesuatu yang menguntungkan. Berbagai bahasa itu akan merefleksikan kekayaan budaya yang ada pada masyarakat pemakainya (multikultural).

Menurut Koentjaraningrat, bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi (Koentjaraningrat, 1992).

Masinambouw menyebutkan bahwa, bahasa dan kebudayaan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah satu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana dalam (Chaer, 1995).

Dalam hipotesis itu, dikemukakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikir manusia. Suatu bangsa yang berbeda bahasanya dari bangsa yang lain, akan memiliki corak budaya dan jalan pikiran yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan budaya dan jalan pikiran manusia tersebut bersumber dari perbedaan bahasa. Bahasa itu memengaruhi kebudayaan dan jalan pikiran manusia, maka ciri-ciri yang ada dalam suatu bahasa akan tercermin pada sikap dan budaya penuturnya.

Contohnya, dalam bahasa Barat ada sistem kala, yakni penutur bahasa memperhatikan dan terikat waktu. Misalnya, pada musim panas pukul 21.00 matahari masih bersinar dengan terang, tetapi anak-anak karena sudah menjadi kebiasaan disuruhnya tidur karena katanya hari sudah malam. Sebaliknya, bagi orang Indonesia karena dalam bahasanya tidak ada sistem kala,

menjadi tidak memperhatikan waktu, seperti acara yang sudah terjadwalkan waktunya bisa mundur satu jam. Itulah sebabnya istilah jam karet hanya ada di Indonesia.

Keterkaitan hubungan dan peran bahasa dengan budaya, tentu ada beberapa kalangan tertentu yang tidak bisa menerima perbedaan. Jika seseorang atau satu kelompok nekat menjadi yang berbeda, konsekuensinya adalah kemungkinan untuk diintimidasi, didiskriminasi, atau bahkan dipersekusi. Mereka yang berani tampil “beda” bisa kehilangan hak untuk mengembangkan potensi diri, menikmati fasilitas negara yang umum, sampai menjajaki karier.

Padahal, jika kebudayaan-kebudayaan yang ada dipaksa untuk menjadi satu (*forced diversity*), akan terjadi perpecahan yang tidak diinginkan. Perpecahan yang dimaksud di sini adalah distorsi kebudayaan, yaitu memutarbalikkan fakta, pengabaian aturan, hukum, nilai-nilai dan sebagainya, yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan kelompok tertentu atau pribadi. Distorsi juga bisa bermakna perubahan bentuk atau sikap akibat beberapa faktor luar yang tidak diinginkan.

Berbagai problematika kemajemukan masyarakat yang ada, memberi tantangan bagi kita untuk secara kreatif dan cerdas kita mampu mengelola kemajemukan budaya yang dimiliki, sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang demokratis, maju dan modern dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat global tanpa tercabut dari akar budaya. Kehidupan masyarakat yang sedemikian itu, memerlukan warga masyarakat yang memiliki kompetensi, yang oleh Mikel Hogan Gracia disebut sebagai kompetensi keragaman budaya atau *cultural diversity competence* (wantimpres.go.id, 5/10/2016). Dengan demikian, diharapkan kita bisa membangun kultur yang saling menghargai, menerima keragaman budaya yang ada, dan berinteraksi secara harmonis dalam hidup bersama untuk bersama-sama hidup.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah siswi SMA yang aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu politik dan sosial. Dapat dihubungi di

samuellachristy3005@gmail.com

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di situs web:

<https://suarakebebasan.id/konsep-hubungan-bahasa-dan-budaya-dalam-masyarakat-demokratis>

DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



WARGA AKTIF DI KOMUNITAS LAKOAT.KUJAWAS

Apakah Anda pernah mendengar tentang “Warga Aktif (Active Citizens)? Di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan tumbuh sebuah Komunitas bernama Lakoat.Kujawas, lahir dari warga desa yang mengintegrasikan perpustakaan, ruang kesenian, kewirausahaan sosial yang bisa diakses anak-anak, orang muda dan orang tua.

Untuk satu mimpi bersama, tercipta generasi baru Mollo yang berkarakter, mendalami akar budaya yang sempat menghilang dari kehidupan bermasyarakat serta membangun kesadaran akan identitas lokal sebagai orang Mollo.

Apa itu warga aktif? bagaimana warga aktif terlibat dan mengelola potensi alam di Taiftob? Menumbuhkan kembali identitas lokal kepada anak-anak. Ikuti bincang kami bersama Ibu Marlinda Nau (Warga Aktif dan praktisi praktik cerdas Lakoat.Kujawas). Lakoat.Kujawas adalah salah satu praktik cerdas yang dipromosikan pada Festival Forum KTI Tahun 2018 lalu.



THE POWER OF WOMEN'S STORIES

Obrolan kami bersama Serlinia Rambu Anawoli (Alumni Program INSPIRASI 2018, Pegiat Komunitas Perempuan dan Pendidikan dan Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Kota Kupang). Obrolan ini tentang cerita dan pengalaman Sherly mengerjakan sebuah program bernama *The Power Of Women's Stories*, gagasan-gagasan, ide serta peluang dari mengumpulkan cerita perempuan marginal dari Kota Kupang dan Timor Tengah Selatan. Agar mereka mampu memanfaatkan potensi dan kekuatan mereka untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga dan komunitasnya.



PENGAWAL LAUT DARI TOMIA

Nelayan di Pulau Tomia, satu dari gugusan pulau-pulau Wakatobi, menjaga lautnya dengan hati. Mereka menandai wilayah tertentu yang dijadikan Bank Ikan. Menjaga dan merawat. Dua kegiatan ini dilakukan nelayan Tomia di Bank Ikan sejak 16 belas tahun silam. Tak ada yang memancing, membuang jala, memasang pukat, apalagi melempar bom di sana.

Para nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tomia (Komunto) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menjaga sekaligus mengelola, memanfaatkan sumber daya laut, melakukan perencanaan zonasi memastikan agar persediaan ikan dapat bertumbuh kembali melalui Bank Ikan.

Praktik Cerdas Penjaga Laut dari Tomia adalah salah satu praktik cerdas yang dipromosikan dalam Festival Forum KTI Tahun 2015 lalu.

Artikel

Memutus Lingkaran Kemiskinan dan Disabilitas di Sulawesi Selatan

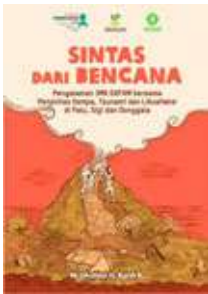
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yang seharusnya dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Tetapi angka disabilitas yang tinggi mengisyaratkan bahwa masih banyak masyarakat yang tertinggal meskipun ada perbaikan ekonomi.

Melalui Kemitraan Riset Indonesia dan Australia (PAIR), tim peneliti akan mendokumentasikan kehidupan para penyandang disabilitas dan isu-isu yang berdampak pada mereka, terutama selama pandemi COVID-19, dan mengembangkan strategi untuk membantu mengeluarkan mereka dari situasi yang rentan.

Hasil penelitian mereka akan memberikan dasar dan bukti bagi pembuat kebijakan untuk mendukung dan memberdayakan para penyandang disabilitas dengan lebih baik. Penelitian tersebut juga menggunakan lensa gender untuk memahami bagaimana perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas terkena dampak yang berbeda.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/memutus-lingkaran-kemiskinan-dan-disabilitas-di-sulawesi-selatan>

Referensi



Sintas dari Bencana: Pengalaman JMK Oxfam Bersama Penyintas Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala

Buku (e-book) sederhana berjudul SINTAS DARI BENCANA ini adalah pengalaman dan pembelajaran JMK yang didukung Oxfam dalam Program Membangun Ketangguhan Bencana Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai respons terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Buku ini memotret beberapa pembelajaran penting dalam program tersebut.

<https://batukarinfo.com/referensi/sintas-dari-bencana-pengalaman-jmk-oxfam-bersama-penyintas-gempa-tsunami-dan-likuefaksi-di>

Peluang

Call for Proposals: Civic Space Fund

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Indonesia is soliciting proposals for its 2021-2024 Civic Space Fund. This fund aims to promote capacity strengthening for civil society organizations in Indonesia to provided to strengthen civil society organisations and amplify their voices in the field that they work in, and is made available to create the opportunity to widen the room for civil society in Indonesia by helping or supporting to create a strong, vibrant civil society that holds public and private actors to account.

The Embassy therefore would like to invite eligible local civil society organizations in Indonesia to submit proposals no later than 13 June 2021 (23:59 WIB) via email with the subject (CSF Call for Proposal – name of organization) to: jak-pa@minbuza.nl

<https://www.batukarinfo.com/news/call-proposals-civic-space-fund>

Berita Terbaru

Agar Bahasa Ibu di Papua Tidak Punah

Jayapura, Papua – Berdasarkan pendataan yang dilakukan Balai Bahasa Papua dan Papua Barat dari 2006 hingga 2019, ada 428 bahasa daerah di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Sebagian besar, 325 bahasa, terdapat di Provinsi Papua dan 103 bahasa di Papua Barat.

Peneliti Bahasa Ahli Muda dari Balai Bahasa Papua dan Papua Barat Yohanis Sanjoko, MA mengatakan ada pendapat sebelumnya yang menyebutkan jumlah bahasa di Papua berkisar antara 272 bahasa. Namun hasil pendataan lembaganya ada 428 bahasa. Dari 428 bahasa tersebut, kata Sanjoko, ada kecenderungan bahasa-bahasa daerah di Papua tersebut mengarah keterancam kepunahan, karena jumlah penuturnya mulai berkurang.

<https://batukarinfo.com/news/agar-bahasa-ibu-di-papua-tidak-punah>